

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Imas Masniah
NIM : 1640200083
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul “PENCATATAN PERCERAIAN DENGAN ITS BAT NIKAH Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, November 2019

Saya yang menyatakan,

Materai 6000

Imas Masniah
NIM: 1640200083

PENGESAHAN

Tesis berjudul : “PENCATATAN PERCERAIAN DENGAN
ITSBAT NIKAH Menurut Pasal 40 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan”
Nama : IMAS MASNIAH
NIM : 1640200083
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tanggal Ujian : 12 November 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum.

Serang, November 2019
Direktur,

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP: 19590826 199003 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS MAGISTER**

Tesis berjudul : “PENCATATAN PERCERAIAN DENGAN
ITSBAT NIKAH Menurut Pasal 40 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan”

Nama : Imas Masniah
NIM : 1640200083
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasah

Ketua : Dr. Nana Suryapermana, M.Pd ()
Sekretaris : Moch. Subekhan, M.Ag ()
Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.A ()
Penguji : Dr. Dedi Sunardi, M.H ()
Pembimbing I : Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum ()
Pembimbing II : Dr. A. Sanusi, M.A ()

Diuji di Serang pada tanggal

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil/nilai :

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul:

“PENCATATAN PERCERAIAN DENGAN ITSBAT NIKAH

Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” Yang ditulis oleh :

Nama : Imas Masniah
Nim : 1640200083
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti UJIAN TESIS MAGISTER dalam rangka memperoleh gelar M.H (Magister Hukum).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 25 Oktober 2019

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. A. Sanusi, M.A.
NIP: 19780225 200801 1009

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum
NIP. 19650227 199103 2 003

ABSTRAK

IMAS MASNIAH, NIM 1640200083, “PENCATATAN PERCERAIAN DENGAN ITSBAT NIKAH Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses perceraian yang dikumulasikan dengan permohonan itsbat nikah serta pengaruh Putusan Pengadilan Agama tentang pencatatan perceraian sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bagi pasangan suami isteri muslim yang pernikahannya belum tercatat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dapat dikabulkan jika tidak bertentangan dengan ketentuan hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama. Adapun perkara perceraian yang dikumulasikan dengan permohonan itsbat nikah, setelah permohonan ini dikabulkan, maka proses perceraian dapat dilanjutkan dan diproses. Sementara itu pengaruh putusan tentang pencatatan perceraian bagi pihak yang berperkara sesuai dengan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah dengan disahkannya itsbat nikah dapat menjadi legalitas untuk suatu pernikahan yang diakui dihadapan hukum, sehingga perceraian dapat diproses dan pencatatan perceraian pun dapat didaftarkan sebagai bentuk tertib administrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas-asas atau dogma-dogma. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan (*library research*). Kemudian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif yang kemudian hasilnya akan disajikan dalam bentuk *deskriptif analitik*. Setelah data terkumpul, data tersebut akan dianalisis secara *kualitatif yuridis* dengan kajian aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian berkesimpulan bahwa : Perceraian dengan Istbat Nikah yang berlaku di Pengadilan Agama merupakan tugas pokok peradilan yang menjadi kewenangan peradilan agama dengan memberikan penetapan itsbat nikah dengan tujuan mengurus perceraian. Perkawinan yang tidak tercatat akan menjadi kendala ketika legalitas perkawinannya tidak diakui oleh hukum, sehingga ketika mendaftarkan perceraian harus mengajukan permohonan pernikahan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan perceraiannya setelah perkara tersebut secara legal formal diputuskan oleh hakim. Sehingga akibat hukum dari putusan pengadilan itulah legalisasi peristiwa hukum sebagai upaya bentuk tertib administrasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 terwujud, dan secara langsung negara telah memberikan perlindungan, kepastian hukum terhadap peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang mencakup : Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan peristiwa peristiwa penting lainnya.

Kata Kunci: Pencatatan Perceraian, Itsbat Nikah, dan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK

IMAS MASNIAH, NIM 1640200083, “DECLARATION OF DIVORCE WITH NOVEMBERS pursuant to Article 40 of Law No. 23 of 2006 on Population Administration”

This study examines how the divorce process was introduced with the application for divorce and the influence of the Religious Court's Decree on the filing of the divorce in accordance with Article 40 of Law No. 23 of 2006 on Population Administration .. For unmarried Muslim couples to apply for divorce married to the Religious Court. Such an application may be granted in contravention of the provisions of the Matter of Law in the Religious Courts. As for divorce matters raised by marriage application, once the application is granted, the divorce process can be continued and processed. Meanwhile, the effect of the decision on the filing of the divorce on behalf of the parties pursuant to article 40 of Law No. 23 of 2006 on Civil Administration is that legalization of marriage can be the legality of a legal marriage, so that divorce can be processed and even divorce can be registered as an administrative form of law as mandated by law.

This research is a normative and empirical juridical research with an approach that conceptualizes law as norms, rules, principles or dogmas. The data sources used are primary data sources and secondary data sources with data collection methods in the form of document studies or library research. Then, the data collection techniques in this study use inductive, deductive and comparative methods which then the results will be presented in a descriptive analytic form. After the data is collected, the data will be analyzed qualitatively in juridical manner by studying the statutory regulations.

The results of the study conclude that: Divorce with Marriage License which applies in the Religious Courts is the main task of the judiciary which becomes the authority of the religious court by providing the determination of marriage license with the aim of taking care of divorce. An unregistered marriage will become an obstacle when the legality of the marriage is not recognized by law, so when registering a divorce must first submit a marriage request then proceed with the divorce after the case is formally decided by the judge. So that the legal consequences of the court's decision is the legalization of legal events as an effort to form an orderly administration as mandated by Law Number 23 of 2006 realized, and directly the state has provided protection, legal certainty for important events in one's life which include: Birth, death, marriage, divorce and other important events.

الملخص

ITSBAT ، "تسجيل الطلاق مع NIM 1640200083 ،IMAS MASNIAH
NIKAH وفقاً للمادة ٤٠ من القانون رقم ٢٣ سنة ٢٠٠٦ بشأن إدارة السكان"

تبحث هذه الدراسة في كيفية تراكم عملية الطلاق مع طلب قانون الزواج وتأثير قرار المحكمة الدينية فيما يتعلق بتسجيل الطلاق وفقاً للمادة ٤٠ من القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن إدارة السكان ، ويمكن للزوج المسلم والزوجة التي لم يتم تسجيل زيجاتها تقديم طلب الزواج من المحكمة الدينية. يمكن الموافقة على الطلب إذا كان لا يتعارض مع أحكام القوانين المادية المعمول بها في المحاكم الدينية. أما بالنسبة لقضية الطلاق التي تراكمت مع طلب الزواج ، فبعد الموافقة على هذا الطلب ، يمكن مواصلة عملية الطلاق ومعالجتها. وفي الوقت نفسه ، فإن تأثير القرار المتعلق بتسجيل الطلاق للمتقاضين وفقاً للمادة ٤٠ من القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن إدارة السكان هو أن تشريع الزواج يمكن أن يصبح شرعية للزواج المعترف به أمام القانون ، بحيث يمكن معالجة الطلاق والطلاق أيضاً. مسجلة كشكل منظم للإدارة وفقاً للقانون.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري وتجريبي مع منهج يصور القانون كقواعد أو قواعد أو مبادئ أو عقائد. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية مع طرق جمع البيانات في شكل دراسات المستندات أو البحوث المكتبية. ثم ، تستخدم تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة الأساليب الاستقرائية والاستنتاجية والمقارنة التي ستقدم النتائج بعد ذلك في شكل تحليلي وصفي. بعد جمع البيانات ، سيتم تحليل البيانات نوعياً بطريقة قانونية من خلال دراسة القوانين واللوائح.

تلخص نتائج الدراسة إلى أن: "الطلاق مع رخصة الزواج" الذي ينطبق على المحاكم الدينية هو المهمة الرئيسية للجهاز القضائي الذي يصبح سلطة المحكمة الدينية من خلال توفير تحديد رخصة الزواج بهدف الاعتناء بالطلاق. سوف يصبح الزواج غير المسجل عقبة عندما لا يعترف القانون بشرعية الزواج ، لذلك عند تسجيل الطلاق يجب أولاً تقديم طلب زواج ثم المضي في الطلاق بعد أن يبت القاضي رسمياً في القضية. بحيث تكون العواقب القانونية لقرار المحكمة هي إضفاء الشرعية على الأحداث القانونية كجهد لتشكيل إدارة منظمة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٦ ، وتحقيق ، ومباشرة وفرت الدولة الحماية واليقين القانوني للأحداث الهامة في حياة الفرد والتي تشمل: الميلاد ، الموت ، الزواج والطلاق وغيرها من الأحداث الهامة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis magister di lingkungan Program Pascasarjana IAIN “SMH” Banten mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1978, tanggal 22 Januari 1988, dengan sedikit penyesuaian. Transliterasi huruf-huruf Arab tertentu bisa dibuat dengan menggunakan *Time New Arabic 12*, dengan cara sebagai berikut :

- ā = Tekan a dan tekan shif+titik
- Ā = Tekan A dan tekan shif+itik
- ī = Tekan I dan tekan shif+titik
- Ī = Tekan I dan tekan shif+koma
- ū = Tekan u dan tekan shif+titik
- Ū = Tekan U dan tekan shif+koma
- ḥ = Tekan h dan tekan shif+kurung kurawal kanan
- Ḥ = Tekan H dan tekan shif+kurung kurawal kiri
- ṣ = Tekan s dan tekan shif+ kurung kurawal kanan
- Ṣ = Tekan S dan tekan shif+kurung kurawal kiri
- ṩ = Tekan s dan tekan garis miring
- Ṩ = Tekan S dan tekan shif+garis miring
- ḍ = Tekan d dan tekan shif+kurung kurawal kanan
- Ḍ = Tekan D dan tekan shif+ kurung kurawal kiri
- ṭ = Tekan t dan tekan shif+kurung kurawal kanan

Ṭ = Tekan T dan tekan shif+kurung kurawal kiri

ẓ = Tekan z dan tekan garis miring

Ẓ = Tekan Z dan tekan shif+garis miring

ẓ̣ = Tekan z dan tekan shif+kurawal kiri

Ẓ̣ = Tekan Z dan tekan shif+kurung kurawal kiri

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B/b	Be
ت	ta'	T/t	Te
ث	tsa'	S/s	Tse (s titik di atas)
ج	jim	J/j	Je
ح	ha'	H/h	Ha (h titik di bawah)
خ	kha'	Kh/kh	Kha (gabungan k dan h)
د	dal	D/d	De
ذ	zal'	Z/z	Zal (z dengan titik di atas)
ر	ra'	R/r	Er
ز	zai	Z/z	Zet
س	sin	S/s	Es
ش	syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	sad	Ş/ş	Es (dengan titik atau garis di bawah)

ض	dad	D/ḍ	De (dengan titik atau garis dibawah)
ط	Ta'	Ṭ/ṭ	Ṭ (dengan titik atau garis di bawah)
ظ	za	Z/z	Ẓ (dengan titik atau garis di bawah)
ء	'ain	'	Koma terbalik di atas
هـ	gain	Gh	Ge (gabungan ta dengan h)
ف	fa'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta' marbutoh

1. Bila diamalkan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak dilakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).


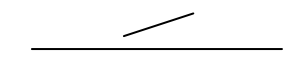
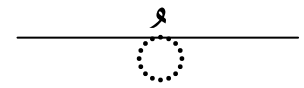
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' *marbuthah* hidup atau dengan *harkat, fathah, kasrah* dan *dhammah* ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zak tul fitri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah+ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	<i>yas'a</i>
Kasrah+ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	Karim
Dammah+wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	Furūdu

Vokal Rangkap

Fathah+ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah+wawu mati	ditulis	ū
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya peneliti curahkan keharibaan Sang Raja Diraja, Pencurah nikmat nan tak terhingga. Shalawat serta salam semoga tetap terhaturkan ke pangkuan Sang Utusan terakhir, lentera dunia penerang jiwa.

Tak terbayangkan sebelumnya, penelitian ini dapat terselesaikan dengan segala keterbatasannya. Melalui langkah yang terseok dan pengetahuan yang terbatas, *alhamdulillah* berkat do'a dan restu orang-orang tercinta, akhirnya peneliti mampu merampungkan tesis ini.

Satu hal yang peneliti harapkan, kehadiran tesis ini akan memberi nuansa baru dalam keilmuan Islam, menambah khazanah keilmuan, serta memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya.

Penulisan tesis ini terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA. yang telah memimpin proses penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai

terobosan-terobosannya untuk kemajuan pendidikan di Banten khususnya.

2. Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum, yang telah memanage dan mengendalikan seluruh program Pascasarjana di UIN Banten.
3. Ibu Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum dan Dr. A. Sanusi, M.A., masing-masing Pembimbing I dan II, yang telah menuntun, mengarahkan peneliti dalam proses penyelesaian tesis ini baik dalam hal teknis maupun substansinya hingga dapat mengantarkan dalam ujian munaqasah.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Dede Permana, Lc M.H., yang telah melakanakan seluruh program kependidikan di Hukum Keluarga Islam dan mendorong peneliti untuk senantiasa semangat menyelesaikan proses perkuliahan dan dalam menulis tesis ini.
5. Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Dedi Sunardi, SH. MH., beserta staffnya yang telah membantu dalam hal keadministrasian sehingga memudahkan peneliti dalam proses penulisan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran dan telah mengajarkan ilmunya kepada peneliti dalam kegiatan perkuliahan dan diskusi sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana UIN SMHB.
7. Ketua dan Wakil Ketua beserta keluarga besar Pengadilan Agama Pandeglang yang telah memberikan kesempatan untuk meningkatkan ilmu melalui bangku kuliah di PPs UIN “SMHB” serta mendorong Penulis untuk secepatnya menyelesaikan Tesis ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta dan keluarga besar (Bani Khomsin dan Bani Kimin) yang tidak henti-hentinya memberikan support dan do’a untuk kesuksesan serta kelancaran penulisan tesis ini.
9. Keluarga kecil Penulis suami dan anak-anak tercinta (Ahmad Mukti, Ahmad Ali Akbar, A. Fathurrahman dan Abizar Alfath) yang telah memberikan waktunya untuk memprioritaskan perkuliahan meskipun dengan “penyakit langkanya anak-anak Penulis” mereka mengikhhlaskan berbagi dengan sisa waktu yang diberikan ibunya.

10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam teman seperjuangan yang telah rela membantu, memberi semangat, sharing pemikiran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Atas jasa-jasa yang mereka sumbangkan tentunya peneliti tidak dapat membalas yang setimpal, namun secara sungguh-sungguh berharap semoga Allah SWT. dapat memberikan pahala atas amal baik yang mereka berikan, dan menjadi bekal dihari kemudian. Amin.

Walhamdulillahirabbil‘alamin.

Serang, 25 Oktober 2019

Peneliti,

Imas Masniah
NIM: 1640200083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DIREKTUR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pemikiran.....	16
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	33

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Pengertian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	35
B. Pengertian Pelayanan Publik	45
C. Tertib Administrasi dan Kepastian hukum	47

BAB III	ITSBAT NIKAH DENGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA	
A.	Pengertian Pencatatan Perkawinan atau Itsbat Nikah Dalam Tataran Hukum Indonesia	52
B.	Peran Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah	66
C.	Produk Peradilan Agama berkaitan dengan Pencatatan Perceraian Melalui Itsbat Nikah	87
D.	Sumber Hukum Formil Materil di Pengadilan Agama	93
BAB IV	ANALISA YURIDIS PENCATATAN PERCERAIAN DENGAN ITSBAT NIKAH	
A.	Proses Perceraian dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama	97
1.	Legalitas Pernikahan dalam Perceraian	97
2.	Peran Istbat Nikah Pada Pernikahan Tidak tercatat	119
3.	Penyimpangan Administrasi Pencatatan Perceraian Yang Diawali Itsbat Nikah	136
B.	Pengaruh Putusan Pengadilan Agama Dalam Pencatatan Bagi Pihak Yang Berperkara Sesuai Dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	154

BAB V PENUTUP

A. Simpulan168
B. Saran-saran170

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN